



Electronic Government Melalui Pengelolaan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (Srikandi): Studi Kasus Kpu Provinsi Bali

Putu Eka Purnamaningsih^{a*}

^a Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Negeri Jember

* Correspondence: ekapurnama@unud.ac.id

Abstract

This research aims to determine the development of electronic government through the management of an integrated dynamic archival information system (SRIKANDI): Case Study of the Bali Province KPU. The method used in this research is a descriptive qualitative method with a case study approach model. Data collection in this research was carried out by means of observation, interviews and documentation. The results obtained are based on the elements of successful e-government development proposed by Indrajit (2004), it was found that the support indicators for the implementation of e-government SRIKANDI have been supported by the highest leaders. The Capacity indicator shows that adequate human resources, financial resources and technological infrastructure are available. However, the obstacles faced in the capacity indicator are the availability of technological infrastructure networks. This is due to frequent errors in accessing the SRIKANDI application. Then in the value indicator, the benefits felt are only from the government, this is because the SRIKANDI application cannot be accessed by the general public.

Keywords: E-government, digital archives, srikandi.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengembangan *electronic government* melalui pengelolaan sistem informasi kearsipan dinamis terintegrasi (SRIKANDI): Studi Kasus KPU Provinsi Bali. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif deskriptif dengan model pendekatan studi kasus. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil yang diperoleh berdasarkan elemen sukses pengembangan *e-government* yang dikemukakan oleh Indrajit (2004), diperoleh bahwa dalam indikator *support* penerapan *e-government* SRIKANDI telah didukung oleh para pemimpin tertinggi. Dalam indikator *Capacity* menunjukkan bahwa telah tersedianya sumber daya manusia, sumber daya finansial serta infrastruktur teknologi yang memadai. Namun kendala yang dihadapi dalam indikator *capacity* ketersediaan jaringan infrastruktur teknologi. hal ini dikarenakan seringnya *error* dalam mengakses aplikasi SRIKANDI. Kemudian dalam indikator *value*, manfaat yang dirasakan hanya dari pihak pemerintah, hal ini dikarenakan aplikasi SRIKANDI tidak dapat diakses oleh masyarakat umum.

Kata Kunci: *E-government*, arsip digital, srikandi.

1. Pendahuluan

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) terus mendorong berbagai sektor untuk melakukan perubahan, termasuk dalam sistem pemerintahan. Penerapan teknologi ini dalam pemerintahan dikenal sebagai *electronic government* atau *e-government*. *E-government* bertujuan memanfaatkan TIK untuk mendukung sistem pemerintahan, meningkatkan efisiensi kerja, serta memperbaiki layanan publik secara efektif dan efisien. Penerapan *e-government* menjanjikan berbagai keuntungan, seperti efisiensi dalam operasional, kecepatan dalam penyampaian informasi, jangkauan informasi yang lebih luas dan global serta transparansi dalam sistem pemerintahan. Dengan adanya *e-government* dapat meningkatkan kualitas layanan publik dan akuntabilitas pemerintah kepada masyarakat. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, diperlukan kebijakan dan strategi pengembangan *e-government* yang terstruktur dan komprehensif. Di Indonesia, kebijakan dan strategi ini diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *e-government* di seluruh jajaran pemerintahan. Kebijakan ini

memberikan panduan bagi pemerintah dalam mengadopsi teknologi informasi dan komunikasi secara menyeluruh untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan publik. (Puji Ayu Lestari, 2021).

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 Tahun 2003 menjadi landasan penting dalam mendorong seluruh instansi pemerintahan di Indonesia untuk menerapkan *e-government*. Dengan adanya kebijakan ini, pemerintah berupaya memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) secara optimal guna mencapai berbagai tujuan strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. *E-government* di lembaga pemerintahan merupakan bentuk dari pemanfaatan teknologi dan komunikasi dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. Hal tersebut dapat dimulai dari pemberian layanan yang sederhana seperti penyediaan informasi serta data-data berbasis komputer mengenai pelaksanaan serta penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang mana sebagai bentuk dari transparansi dalam pelayanan publik. Penerapan *e-government* semakin kompleks yang mana disebabkan karena kecanggihan teknologi informasi. Salah satu penerapan *e-government* dalam lembaga pemerintahan adalah dalam sistem pengelolaan arsip (Robert, 2024).

Arsip adalah hasil karya dari setiap instansi untuk mendukung kegiatan operasional sehari-hari, menjadi dasar operasional, memenuhi kebutuhan harian, serta menjadi memori organisasi. Selain itu, arsip juga berfungsi sebagai alat bukti yang sah untuk keperluan hukum dan administrasi. Oleh karena itu, pencatatan arsip harus dilakukan dengan teliti dan cermat. Dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang begitu cepat, pengelolaan arsip digital menjadi suatu kebutuhan yang tidak terhindarkan. Tuntutan zaman mengharuskan kita meninggalkan cara-cara lama atau klasik dalam mengelola arsip karena tidak efisien, aksesnya lambat, dan penyimpanannya berantakan (Adra, 2023). Mengadopsi cara baru dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi secara terintegrasi akan memberikan efisiensi, efektifitas, dan kemudahan akses untuk publik, terutama dalam bidang pemerintahan.

Sistem pengelolaan arsip yang semakin kompleks mengakibatkan arsip bertransformasi serta terintegrasi menjadi data digital yang disebut dengan arsip digital. Kearsipan elektronik merupakan bukti nyata dari implementasi *e-government* yang dapat memudahkan akses terhadap sumber informasi arsip dimanapun dan kapanpun. Arsip digital merupakan bentuk transformasi arsip konvensional menjadi data digital yang terintegrasi untuk memudahkan pengelolaan serta akses informasi dalam penerapan *e-government* di lembaga pemerintahan (Yuanita Utami, 2024). Sistem kearsipan digital ini memungkinkan efisiensi dan kemudahan dalam pengelolaan data dan informasi pemerintah. Arsip digital memberikan berbagai manfaat signifikan dalam konteks pengelolaan informasi. Pertama, digitalisasi arsip memungkinkan penyimpanan data dalam format yang lebih ringkas, sehingga menghemat ruang fisik dan mengurangi risiko kerusakan atau kehilangan data akibat bencana alam, kebakaran, atau kejadian tak terduga lainnya. Kedua, dengan adanya arsip digital, pencarian dan pengambilan data menjadi lebih cepat dan akurat melalui sistem pencarian berbasis metadata yang canggih. Ketiga, aksesibilitas data menjadi lebih fleksibel, memungkinkan pegawai pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya untuk mengakses informasi yang mereka butuhkan dari lokasi manapun selama terhubung dengan internet. Selain itu, kearsipan digital juga mendukung transparansi dan akuntabilitas dalam administrasi pemerintahan. Data yang terintegrasi dan mudah diakses memastikan bahwa setiap keputusan dan kebijakan yang diambil dapat didasarkan pada informasi yang akurat dan up-to-date. Hal ini juga mendukung proses audit dan penilaian kinerja yang lebih efektif karena data dan dokumen pendukung tersedia dalam format digital yang mudah ditelusuri dan dianalisis.

Salah satu lembaga yang menerapkan kearsipan digital yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Bali. KPU Provinsi Bali menerapkan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas kearsipan, administrasi, dan berbagai tugas lainnya. Penggunaan aplikasi SRIKANDI ini menjadi langkah strategis dalam memastikan bahwa pencatatan informasi, baik berbasis analog maupun digital, dilakukan dengan baik. Hal ini tidak hanya memudahkan akses dan pengelolaan data, tetapi juga menjadikan informasi tersebut sebagai bukti akuntabilitas dan memori kolektif bangsa. Tujuan utama penerapan aplikasi ini adalah untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel. Selain itu, diharapkan dapat memberikan pelayanan publik yang berkualitas dan dapat dipercaya, sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Penerapan SRIKANDI di KPU Provinsi Bali masih mengalami permasalahan seperti Pertama, seringnya error dari aplikasi SRIKANDI yang menyebabkan terhambatnya proses penginputan surat. Kendala teknis seperti seringnya error pada aplikasi SRIKANDI menjadi masalah utama yang harus segera diatasi. Error pada aplikasi bisa disebabkan oleh berbagai faktor, seperti ketidakstabilan server, bugs dalam perangkat lunak, atau kapasitas sistem yang tidak memadai untuk menangani volume data yang besar. Masalah ini mengakibatkan proses penginputan surat menjadi terhambat dan memerlukan waktu lebih lama dari yang seharusnya, yang pada akhirnya mempengaruhi efisiensi kerja. Kedua, tidak adanya notifikasi pemberitahuan surat masuk dalam aplikasi SRIKANDI ini menyebabkan terhambatnya proses disposisi surat yang masuk. notifikasi adalah fitur penting dalam sistem manajemen arsip digital karena membantu memastikan bahwa setiap surat atau dokumen yang masuk dapat segera diketahui dan ditindaklanjuti oleh pihak yang berkepentingan. Tanpa notifikasi, surat-surat yang masuk mungkin tidak segera dilihat atau diproses, yang menyebabkan keterlambatan dalam disposisi dan penanganan surat tersebut.

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “*Electronic Government Melalui Pengelolaan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI): Studi Kasus KPU Provinsi Bali*”. Dengan rumusan masalah “Bagaimana Pengembangan *Electronic Government* Melalui Pengelolaan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI): Studi Kasus KPU Provinsi Bali”.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan model pendekatan studi kasus yang memfokuskan eksplorasi “sistem terbatas” atas satu kasus khusus ataupun pada sebagian kasus secara terperinci dengan penggalan data secara mendalam. Studi kasus adalah metode penelitian di mana seseorang menyelidiki program, peristiwa, aktivitas, proses, atau sekelompok orang secara menyeluruh. kasus dibatasi oleh waktu dan aktivitas, dan peneliti mengumpulkan informasi secara menyeluruh dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data pada waktu yang telah ditentukan (Adhi Kusumastuti, 2019). Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh melalui hasil wawancara dengan pihak terkait, serta data sekunder yang berasal dari laporan-laporan, catatan, atau dokumen dari para informan. Dalam penelitian ini, peneliti menerapkan teknik triangulasi untuk memverifikasi keabsahan data. Teknik ini dilakukan dengan mengajukan pertanyaan yang sama melalui wawancara kepada berbagai informan untuk memastikan konsistensi data (Sugiyono, 2022). Wawancara semi terstruktur digunakan dalam penelitian ini, di mana peneliti mengonfirmasi dan menganalisis keakuratan jawaban dengan pertanyaan yang sama kepada setiap informan. Lokasi penelitian bertempat di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Bali.

3. Hasil dan Pembahasan

Aplikasi SRIKANDI diatur dalam Peraturan Arsip tahun 2021 tentang Pedoman Penerapan Sistem Informasi Kearsipan Terintegrasi (SRIKANDI). Aplikasi ini merupakan aplikasi umum pertama yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 679 Tahun 2020 tentang Aplikasi Umum Bidang Kearsipan Dinamis (AUBKD). Aplikasi SRIKANDI merupakan aplikasi berbentuk website yang bisa diakses dimanapun sehingga ini sangat efisien dan efektif terhadap waktu dan biaya dikarenakan seluruh proses administrasi kantor dapat dilaksanakan dengan online dan dapat juga dilakukan diluar kantor karena dalam mengakses hanya memerlukan internet (Kirana, 2023). Contohnya seperti dalam menginput atau menuliskan disposisi surat dapat dilakukan kapanpun dan dimanapun melalui aplikasi ini. KPU Provinsi Bali menerapkan aplikasi SRIKANDI untuk mempermudah kegiatan surat menyurat, seperti halnya dapat diterima secara *realtime*, memudahkan dalam proses memonitoring terhadap arsip, surat-surat serta dokumen menjadi lebih tertata rapi tanpa harus membuka catatan secara manual serta mengurangi risiko kehilangan atau tumpang tindih surat masuk dan surat keluar.

Aplikasi SRIKANDI dapat diakses melalui <https://srikandi.arsip.go.id/auth/login>. Keunggulan aplikasi SRIKANDI diantaranya (Faizatur Rahmah, 2023):

- 1) Surat atau produk tidak pernah hilang dari aplikasi SRIKANDI
- 2) Proses surat keluar dan surat masuk instansi lebih cepat
- 3) Lebih efisien dan efektif terhadap waktu, tenaga, dan biaya.

Secara keseluruhan, aplikasi SRIKANDI tidak hanya dianggap sebagai suatu inovasi teknologi semata, melainkan juga sebagai tonggak penting dalam perjalanan menuju digitalisasi administrasi pemerintahan yang lebih canggih dan terintegrasi di Indonesia. Dengan menyediakan platform yang komprehensif untuk pengelolaan arsip secara digital, SRIKANDI menawarkan potensi besar untuk meningkatkan efisiensi, keamanan, dan kualitas pengelolaan informasi di seluruh lembaga pemerintahan. Salah satu tujuan utama dari penerapan SRIKANDI adalah untuk mengurangi ketergantungan pada penggunaan kertas dalam administrasi pemerintah, sebuah langkah yang tidak hanya ramah lingkungan tetapi juga membawa manfaat ekonomi dan operasional yang signifikan. Dengan memfasilitasi transisi dari dokumen fisik menjadi format digital, SRIKANDI membuka jalan bagi penghematan biaya penyimpanan, pemrosesan, dan pengiriman dokumen, sambil juga meminimalkan risiko kerugian atau kerusakan data yang dapat terjadi pada dokumen fisik. Lebih dari itu, SRIKANDI juga bertujuan untuk mempercepat proses pengadministrasian dan mempermudah pengarsipan dengan menyediakan alat-alat yang intuitif dan efisien bagi para pegawai pemerintah untuk mengelola, mencari, dan mengakses informasi yang mereka perlukan dengan cepat dan akurat. Dengan demikian, SRIKANDI tidak hanya menjadi sebuah alat teknologi yang kuat, tetapi juga merupakan cerminan dari komitmen pemerintah Indonesia untuk terus berinovasi dalam meningkatkan pelayanan publik, mendorong transparansi, dan meningkatkan efisiensi administrasi demi kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Gambar 1. Aplikasi SRIKANDI



Sumber: <https://srikandi.arsip.go.id/auth/login>

Dalam aspek teknologi informasi, tentunya penerapan *e-government* melalui aplikasi SRIKANDI mendukung berbagai aspek kemajuan pemerintahan dalam meningkatkan transparansi, efektivitas dan efisiensi tata kelola kearsipan, oleh karena itu untuk mengukur faktor keberhasilan penerapan *e-government* melalui aplikasi SRIKANDI peneliti menggunakan teori indikator elemen sukses pengembangan *e-government* yang dikemukakan oleh Indrajit, 2004 yaitu *support*, *capacity*, dan *value* adalah sebagai berikut (Indrajit, 2004):

1. Support

Elemen penting yang sangat krusial bagi pemerintah adalah adanya komitmen kuat dari semua kalangan pejabat publik dan politik untuk benar-benar mengimplementasikan konsep *e-government*. Komitmen ini harus lebih dari sekadar mengikuti tren atau bahkan menentang inisiatif terkait prinsip-prinsip *e-government*. Dukungan yang diperlukan tidak hanya berupa janji lisan, tetapi juga diwujudkan dalam berbagai bentuk konkret seperti alokasi sumber daya (manusia, finansial, tenaga, waktu, dan informasi) di setiap tingkat pemerintahan. Selain itu, diperlukan pembangunan infrastruktur dan superstruktur yang mendukung agar tercipta lingkungan kondusif untuk pengembangan *e-government*, seperti adanya Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah yang jelas, serta pembentukan lembaga-lembaga atau struktur organisasi yang menaungi. Dalam upaya mewujudkan keberhasilan dari penerapan *e-government*, hal yang dibutuhkan adalah dukungan dari berbagai pihak terutama pimpinan tertinggi lembaga. Dengan adanya dukungan yang tinggi dari para pemimpin tertinggi, tentunya penerapan *e-government* akan memiliki dasar yang kuat dalam mencapai keberhasilan yang diinginkan. Dalam hal ini, tentunya penerapan dari aplikasi SRIKANDI di KPU Provinsi Bali didukung oleh para pemimpin tertinggi. Dimana dukungan yang diberikan berupa Surat Edaran Nomor 15 tahun 2023 tentang Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) di Lingkungan Sekretariat Jenderal KPU yang berdasarkan pada Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 679 Tahun 2020 Tentang Aplikasi Umum Bidang Kearsipan Dinamis.

2. Capacity

Capacity ini mencakup berbagai aspek yang harus dipenuhi agar *e-government* dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat dan pemerintah itu sendiri. *Capacity* yang dimaksud adalah keahlian atau kekuatan yang dimiliki pemerintah setempat untuk dapat mewujudkan penerapan *e-government* menjadi suatu kenyataan. *Capacity* dalam penerapan SRIKANDI di KPU Provinsi terlihat dengan adanya sumber daya manusia yang tersedia, sumber daya finansial yang dimana dengan adanya sumber daya finansial juga mendukung adanya sumber daya infrastruktur. Hal ini dapat dilihat dengan Petugas KPU mendapatkan pelatihan yang memadai mengenai penggunaan aplikasi SRIKANDI, termasuk pemahaman tentang manajemen arsip digital, keamanan data, dan penggunaan sistem. Dalam penerapannya KPU Provinsi Bali memiliki infrastruktur teknologi yang memadai, termasuk komputer, server, dan perangkat lunak yang diperlukan untuk mendukung aplikasi SRIKANDI. Disamping hal tersebut terkait ketersediaan jaringan infrastruktur teknologi menjadi suatu kendala dalam menjalankan aplikasi Srikandi ini. Hal ini dikarenakan seringnya terjadi situs error saat membuka aplikasi SRIKANDI. Hal ini tentunya menjadi penghambat dalam mewujudkan efisiensi dalam menginput data-data.

3. Value

Value yang dimaksud adalah nilai atau manfaat dari diterapkannya *e-government*. Nilai ini harus dilihat dari sudut pandang masyarakat, bukan dari pemerintah selaku penyedia layanan. Dikarenakan aplikasi SRIKANDI ini merupakan model *government to government* yang dimana untuk melakukan koordinasi serta interaksi di antara instansi atau lembaga pemerintah baik pusat maupun daerah, sehingga masyarakat tidak dapat mengakses aplikasi ini. Manfaat yang dirasakan dari penerapan Srikandi hanya dirasakan oleh pemerintah saja. Adapun manfaat tersebut yang mana dapat memudahkan pemerintah untuk melihat terkait surat masuk, disamping itu data-data terkait surat ataupun hal lain dapat tersimpan dengan aman dalam SRIKANDI. Dengan berbagai nilai ini, penerapan SRIKANDI tidak hanya meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional instansi pemerintah tetapi juga mendukung peningkatan pelayanan publik, keamanan data, dan pengelolaan informasi yang lebih baik. Ini sejalan dengan tujuan modernisasi administrasi pemerintahan melalui digitalisasi.

4. Kesimpulan

Berdasarkan analisis hasil temuan yang dilakukan oleh penulis dengan judul “*Electronic Government Melalui Pengelolaan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI): Studi Kasus KPU Provinsi Bali*” dapat disimpulkan bahwa penerapan *e-government* di KPU Provinsi Bali sudah berjalan dengan baik. hal ini

dapat dilihat melalui indikator elemen sukses pengembangan *e-government* yang dikemukakan oleh Indrajit (2004). Dalam indikator *support*, penerapan *e-government* di KPU Provinsi Bali telah didukung oleh pemimpin-pemimpin tertinggi. Hal ini dibuktikan dengan adanya dasar-dasar hukum yang mengatur terkait penerapan *e-government* berbasis sistem informasi kearsipan dinamis terintegrasi (SRIKANDI). Dalam indikator *capacity*, penerapan *e-government* di KPU Provinsi Bali telah didukung oleh sumber daya yang memadai baik sumber daya manusia, sumber daya finansial dan sumber daya infrastruktur. Namun yang menjadi kendala yaitu jaringan infrastruktur yang kurang, yang mana seringkali dalam mengakses aplikasi SRIKANDI terjadi *error*. Dalam indikator *value*, manfaat yang dirasakan hanya pada pihak pemerintah. Hal ini dikarenakan aplikasi SRIKANDI ini tidak dapat diakses oleh masyarakat umum. Dan fokus aplikasi SRIKANDI ini pada pengelolaan surat maupun data-data terkait sehingga hanya dapat diakses oleh pemerintah saja.

Daftar Pustaka

- Adra, A. (2023). Pemanfaatan Aplikasi Srikandi Bagi Pegawai Di Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Regional Bukittinggi. Universitas Negeri Padang.
- Faizatur Rahmah, M. (2023). Penerapan Electronic Government melalui Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (Srikandi) Di Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kota Probolinggo. Publikas, 2341-2350.
- Hasibuan, Z. A. (2007). Langkah-Langkah Strategis Dan Taktis Pengembangan *E-government* Untuk Pemda. *Jurnal Sistem Informasi Mti Ui*, 3(1), 6-70.
- Indrajit, R. E. (2004). *Electronic Government: Konsep Pelayanan Public Berbasis Internet Dan Teknologi*. Yogyakarta: Aptikom.
- Indrajit, R. E. (2022). *Electronic Government*.
- Kirana, V. D. (2023). Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (Srikandi) Dari Role Tata Usaha Di Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Sukoharjo.
- Puji Ayu Lestari, A. T. (2021). Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Digital (*E-government*) Di Era Pandemi Covid-19. *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu Dan Praktek Administrasi*, Vol.18 No.2.
- Robert, T. (2024). Penerapan *E-government* di Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru. *Pediaqu: Jurnal Pendidikan Sosial Dan Humaniora*, Vol 3 No 2.
- Rozikin, M., Hesty, W., & Sulikah, S. (2020). Kolaborasi Dan E-Literacy: Kunci Keberhasilan Inovasi *E-government* Pemerintah Daerah. *Jurnal Borneo Administrator*, 16(1), 61-80.
- Sugiyono, P. D. (2022). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Tasyah, A., Lestari, P. A., Syofira, A., Rahmayani, C. A., Cahyani, R. D., & Tresiana, N. (2021). Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Digital (*E-government*) Di Era Pandemi Covid-19. *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu Dan Praktek Administrasi*, 18(2), 212-224.
- Yuanita Utami, H. K. (2024). Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi Di Pemerintah Kabupaten Kendal Provinsi Jawa Tengah. *Action Research Literate*, Vol. 8, No. 4,.